



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI

TERMINAL TIPE A MENGWI (GD. A)
Jl. RAYA MENGWITANI, KEC.
MENGWI, KAB. BADUNG (80351)

TELP : 0361-7990-180

Email : bptdbali.hubdat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI
NOMOR : SK-BPTD-II-BALI 32 Tahun 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI
TAHUN 2026

KEPALA BALAI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Program di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali untuk menetapkan :

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:

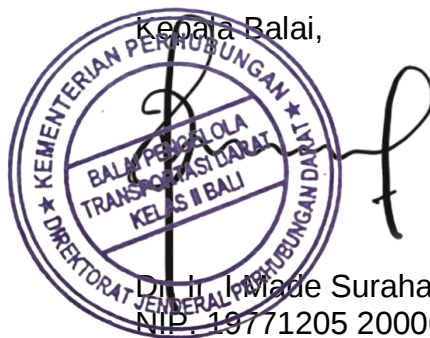
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
- b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon

II dan Unit Organisasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, SDP, dan Kepala Seksi Prasarana Jalan, SDP sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Balai,



Di. Ir. Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM..
NIP. 19771205 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Bali
Tentang Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun
2026

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI
TAHUN 2026

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 1.1.2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK		IKK 1.1.2	Jumlah Layanan Transportasi Angkutan Jalan	Subsidi
DEFINISI					
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan penumpang adalah Jumlah layanan angkutan jalan penumpang yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran					
SATUAN					
Layanan					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK	Meningkatnya	Konektivitas	IKK	Jumlah	Layanan	Subsidi
1.2	Transportasi Angkutan SDP		1.2.1	Transportasi ASDP wilayah DTPK		
DEFINISI						
Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP adalah Jumlah layanan angkutan ASDP yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT.						
SUMBER DATA						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali						
CARA MENGHITUNG						
Jumlah trayek layanan subsidi transportasi ASDP dalam satu tahun anggaran						
SATUAN						
Layanan						
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali						

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.3	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	
DEFINISI					
Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SATUAN					
Unit					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.7	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	
DEFINISI					
Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SATUAN					
Unit					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.8	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan MRLI pada Jalan Nasional dan Event Khusus	
DEFINISI					
Jumlah kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lalu lintas, ATCS/ITS, ATMS diwilayah kerja sesuai dengan ketentuan					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lalu lintas, ATCS/ITS, ATMS diwilayah kerja sesuai dengan ketentuan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SATUAN					
Kegiatan					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	
DEFINISI					
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LLAJ, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SATUAN					
Kegiatan					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.10	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI LLAJ	
DEFINISI					
Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLAJ.					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT					
SATUAN					
Kegiatan					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
KEGIATAN					
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP		IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	
DEFINISI					
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan					
SUMBER DATA					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.					
SATUAN					
Unit					
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali					

PROGRAM			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
KEGIATAN			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP
DEFINISI			
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi diluar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
KEGIATAN			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.5	Penyusunan Dokumen Teknis terkait TUSI ASDP
DEFINISI			
Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi LLASDP meliputi dokumen perencanaan, regulasi, operasional, sarana prasarana, pengawasan, keselamatan, kinerja, serta sistem informasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan LLASDP.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Dokumen teknis pendukung tugas dan fungsi LLASDP, yang anggarannya berada pada BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Penumpang
DEFINISI			
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ramp Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi Ramp Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan keselamatan Angkutan Barang
DEFINISI			
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraanJumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			

Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi Ram Check, pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman
DEFINISI			
Proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.2	Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB
DEFINISI			
Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			

PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.3	Menurunkan Jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)
DEFINISI			
Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda pada ruas Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis) yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT			
SATUAN			
Unit			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.3	Menurunkan Jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang telah diintervensi sesuai ketentuan
DEFINISI			
Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah diintervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll. yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			
SATUAN			
LRK			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.4.1	Jumlah kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ
DEFINISI			
Serangkaian upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkeselamatan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Kampanye keselamatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dari pengguna jalan . Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan target peserta kampanye yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 3.4.2	Jumlah kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ
DEFINISI			
Program edukasi keselamatan yang bertujuan menanamkan kesadaran dan perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
SALUD merupakan upaya pembentukan safety culture sejak dini dengan sasaran anak usia PAUD–SD yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan transportasi Darat pada Provinsi Bali

DEFINISI
kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Provinsi Bali
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Kegiatan terkait perencanaan jangka pendek , menengah dan panjang transportasi darat di Provinsi Bali.
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

DEFINISI
Kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Kegiatan terkait PK, SAKIP, LAKIP, MR, SPIP dan LMCK pada BPTD yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CATATAN			
PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

DEFINISI			
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Kegiatan terkait Daya serap dan realisasi keuangan.			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CATATAN			

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)

DEFINISI			
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)

DEFINISI
Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Prosentase dihitung dari jumlah Rekomendasi BPK yang telah di tindaklanjuti (Status Proses) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima.
SATUAN
%
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan

DEFINISI
Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG

Semakin tinggi tingkat digitalisasi arsip di suatu instansi, maka tantangan pengawasan kearsipan juga semakin kompleks, Capaian kegiatan tingkat digitalisasi arsip dihitung dengan Pengawasan Kearsipan Internal, Sosialisasi Kearsipan
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

DEFINISI
Ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Jumlah Kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

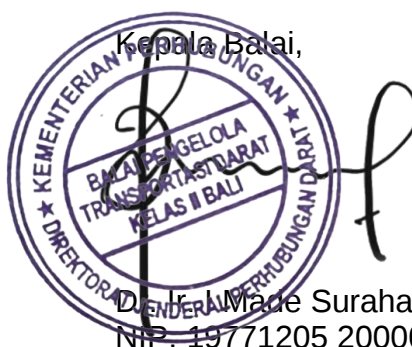
Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Jumlah Kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam 1 tahun
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI
Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Jumlah Kegiatan terkait ZI, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam 1 tahun
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN

PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
KEGIATAN			
MENDUKUNG PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/ Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI
alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.
SUMBER DATA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CARA MENGHITUNG
Jumlah Kegiatan terkait Survey Kepuasan pengguna jasa
SATUAN
Kegiatan
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
CATATAN



Kepala Balai,

D. H. Made Suraharta, S.T., S.Si.T., M.T., IPM..
NIP. 19771205 200003 1 002